

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap Kualitas Audit dengan Kompetensi Bukti Audit sebagai variabel intervening di Inspektorat Kota Padang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit. Hal ini dibuktikan dengan nilai *t-value* sebesar 2,632 ( $> 1,96$ ) dan *p-value* 0,009 ( $< 0,05$ ). Secara praktis, tingginya kompetensi auditor yang tecermin dari penguasaan standar audit dan regulasi pemerintah daerah secara nyata meningkatkan ketajaman analisis dalam menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang akurat di Inspektorat Kota Padang. Temuan ini didukung oleh penelitian Vadia dkk. (2025).
2. Independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit. Hal ini dibuktikan dengan nilai *t-value* sebesar 3,242 ( $> 1,96$ ) dan *p-value* 0,001 ( $< 0,05$ ). Sikap mental yang bebas dari intervensi dan tekanan birokrasi terbukti menjadi faktor kunci yang menjaga objektivitas auditor, sehingga opini yang dihasilkan lebih kredibel dan dapat dipercaya sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (Good Governance).
3. Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kompetensi Bukti Audit. Hal ini dibuktikan dengan nilai *t-value* sebesar 5,015 ( $>$

1,96) dan p-value 0,000 ( $< 0,05$ ). Data menunjukkan bahwa pemahaman intelektual mengenai prosedur pengujian bukti secara langsung memperkuat kemampuan auditor dalam menyaring dan mengevaluasi bukti audit yang benar-benar relevan dan material.

4. Independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kompetensi Bukti Audit. Hal ini dibuktikan dengan nilai t-value sebesar 4,354 ( $> 1,96$ ) dan p-value 0,000 ( $< 0,05$ ). Keteguhan auditor dalam menjaga jarak profesional memastikan bahwa proses pengumpulan bukti dilakukan secara jujur dan tidak bias, sehingga meminimalkan risiko penggunaan bukti yang telah dimanipulasi oleh pihak auditee.
5. Kompetensi Bukti Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit. Hal ini dibuktikan dengan nilai t-value sebesar 2,663 ( $> 1,96$ ) dan p-value 0,008 ( $< 0,05$ ). Kualitas hasil pemeriksaan sangat bergantung pada kekuatan pembuktiannya; semakin kompeten bukti yang diperoleh (relevan dan andal), maka semakin kecil risiko kegagalan audit dan semakin tinggi kualitas rekomendasi yang diberikan.
6. Kompetensi Bukti Audit secara signifikan mampu memediasi pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit. Hal ini dibuktikan dengan nilai t-value sebesar 2,438 ( $> 1,96$ ) dan p-value 0,015 ( $< 0,05$ ). Pengaruh ini bersifat partial mediation, yang berarti keahlian auditor akan berdampak lebih maksimal dalam meningkatkan kualitas audit apabila diwujudkan melalui proses penilaian bukti audit yang mendalam dan profesional.

7. Kompetensi Bukti Audit secara signifikan mampu memediasi pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit. Hal ini dibuktikan dengan nilai *t-value* sebesar 2,099 ( $> 1,96$ ) dan *p-value* 0,036 ( $< 0,05$ ). Sebagai variabel *intervening*, kompetensi bukti audit menjadi jembatan bagi auditor yang independen untuk memvalidasi temuannya secara objektif, yang pada akhirnya secara sistematis meningkatkan kualitas laporan audit secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperkuat penerapan Teori Keagenan (*Agency Theory*), di mana auditor di Inspektorat Kota Padang berperan penting sebagai pihak yang menjembatani transparansi informasi antara pemerintah (agen) dan masyarakat (prinsipal) melalui penguatan kompetensi, independensi, dan ketajaman dalam mengelola bukti audit.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diperoleh, maka diajukan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi Inspektorat Kota Padang (Objek Penelitian)
  - a. Peningkatan Kompetensi Berkelanjutan: Mengingat kompetensi terbukti signifikan mempengaruhi kualitas audit, Inspektorat hendaknya secara rutin menyelenggarakan pelatihan teknis (Diklat) yang spesifik, terutama terkait audit berbasis risiko dan pemanfaatan sistem digital (seperti SIPD), agar auditor tetap adaptif terhadap perubahan regulasi pemerintah daerah.

- b. Penguatan Independensi Mental: Pimpinan Inspektorat perlu terus menumbuhkan budaya kerja yang independen dengan memberikan perlindungan bagi auditor dari tekanan eksternal atau birokrasi, sehingga auditor merasa aman dalam menyajikan temuan objektif sesuai fakta lapangan.
- c. Standarisasi Pengelolaan Bukti Audit: Karena kompetensi bukti audit terbukti menjadi variabel mediasi yang penting, Inspektorat disarankan untuk memperketat prosedur verifikasi dan validasi bukti audit (relevansi dan keandalan) melalui *review* berjenjang yang lebih intensif sebelum laporan hasil pemeriksaan (LHP) diterbitkan.

## 2. Bagi Auditor (APIP)

Auditor diharapkan dapat meningkatkan skeptisisme profesional dan ketelitian dalam mengumpulkan bukti audit. Pengalaman yang ada harus dibarengi dengan integritas tinggi agar bukti yang diperoleh tidak hanya bersifat administratif, tetapi menyentuh substansi permasalahan untuk mencegah adanya temuan berulang.

## 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Perluasan Variabel: Penelitian ini memiliki nilai *R-Square* untuk Kualitas Audit sebesar 72,9%, yang berarti masih terdapat 27,1% faktor lain yang belum diteliti. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain seperti etika auditor, skeptisisme

profesional, atau pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai variabel independen lainnya.

- b. Perluasan Objek: Mengingat penelitian ini hanya dilakukan pada Inspektorat Kota Padang dengan jumlah responden 35 orang, diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan wilayah penelitian (misalnya mencakup beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Barat) untuk mendapatkan hasil yang lebih general.
- c. Metode Penelitian: Disarankan untuk menggunakan metode kombinasi (kuantitatif dan kualitatif/wawancara mendalam) agar dapat menggali lebih dalam fenomena tekanan independensi yang sering dialami auditor di sektor publik secara nyata.